LAPORAN AKHIR DANA PNBP FAKULTAS



PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN BUMN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

Amir Lukum, S.Pd., MSA Rio Monoarfa, SE.Ak., M.Si

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOVEMBER 2014

HALAMAN PENGESAHAN **PENELITIAN DANA PNBP FEB**

Judul Kegiatan

: Peran Good Corporate Governance Dalam Pada Perusahaan BUMN Yang Listing di

Ketua Peneliti

Nama Lengkap

NIDN/NIP b.

Jabatan Fungsional C.

d. Program Studi

e. No. HP

Surel (e-mail)

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap

NIDN

Perguruan Tinggi

Lama penelitian Keseluruhan

Penelitian Tahun Ke

Biaya Penelitian Keseluruhan

Biaya Tahun Berjalan

Corporate Social Responsibility Disclosure

Bursa Efek Indonesia

: Amir Lukum, S.Pd., MSA

: 0001058402

: Asisten Ahli

: S1 Akuntansi

: 081233184157

: amirlukum@gmail.com

: Rio Monoarfa, SE. Ak., M.Si

: 0008107405

: UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

: 3 (Tiga) bulan

. 1

: Rp. 5.000.000,-

- Diusulkan Ke Lembaga: Rp 5.000.000,-

: -

- Dana Internal PT

- Dana Institusional Lain : -

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi UNG,

Dr. Hamzah Yunus, M.Pd NIP. 19600223 198603 1004

Gorontalo, 27 November 2014 Ketua Tim Panelitio

Amir Lukum, S.Pd. NIP. 19840501 201012 1 007

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si LEMBAGAUPNEL 19691209 199303 2 001

KETUA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran *Good Corporate Governance* dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan BUMN yang listing di BEI. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Pemerintah dan variabel dependennya adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang listing di BEI pada tahun 2011 – 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan *Multiple Regression Analysis*.

Hasil penelitian diperoleh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan pemerintah berperan penting dalm *corporate social responsibility disclosure*. sedangkan variabel kepemilikan manajerial tidak berperan dalam *corporate social responsibility disclosure*.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan izin-Nya

lah penelitian ini dapat kami selesaikan. Penelitian ini dengan judul "Peran Good

Corporate Governance Dalam Corporate Social Responsibility Disclosure Pada

Perusahaan BUMN Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia".

Kami selaku peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat

kekurangan dalam banyak hal, namun kami tetap berusaha membuat penelitian ini

dengan harapan dapat dijadikan sebagai literatur bagi para pembaca dan juga

dapat dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan

tema yang sama dikemudian hari.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

membantu dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan penelitian

ini sehingga penelitian ini selesai. Semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat

bagi siapa saja yang mau menggeluti tentang Corporate Social Responsibility

(CSR).

Gorontalo,

November 2014

Ketua Tim,

iii

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
IDENTITAS PENELITIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Teori Stakeholders	5
2.1.2 Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)	6
2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)	9
2.1.4 Karakteristik Good Corporate Governance	11
2.2 Peneltian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Konseptual	18
2.4 Hipotesis	19
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	20
3.1 Tujuan Penelitian	20

3.2 Manfaat Penelitian	20
BAB IV METODE PENELITIAN	22
4.1 Desain Penelitian	22
4.2 Populasi dan Sampel	22
4.3 Jenis, Sumber, dan teknik pengumpulan data	23
4.4 Definisi Operasional Variabel	24
4.4.1 Variabel Dependen	24
4.4.2 Variabel Independen	25
4.5 Teknik Analisis Data	26
4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	26
4.5.2 Uji Asumsi Klasik	25
4.6 Hipotesis Statistik	27
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
5.1 Deskripsi Objek Penelitian	28
5.2 Statistik Deskriptif	29
5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	32
5.4 Hasil Pengujian Hipotesis	37
5.5 Pembahasan	44
5.5.1 Ukuran Dewan Komisaris Dengan <i>Corporate</i>	
Social Responsibility Disclosure	44
5.5.2 Komisaris Independen Dengan Corporate Social	
Responsibility Disclosure	45
5.5.3 Kepemilikan Manajerial Dengan <i>Corporate</i>	
Social Responsibility Disclosure	47

5.5.4	Kepemilikan Pemerintah Dengan Corporate		
	Social Responsibility Disclosure	49	
BAI	B VI KESIMPULAN DAN SARAN	53	
6.1	Simpulan	53	
6.2	Keterbatasan Penelitian	54	
6.4	Saran	55	
DAI	FTAR PUSTAKA	56	

DAFTAR TABEL

		Hal
5.1	Perusahaan BUMN Yang Dijadikan Sampel	29
5.2	Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel	30
5.3	Hasil Uji Normalitas Data	33
5.4	Hasil Uji Multikolinieritas	34
5.5	Hasil Uji Autokorelasi	37
5.6	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual	38
5.7	Hasil Uji Signifikansi Simultan	41
5.8	Hasil Uji Determinasi	43

DAFTAR GAMBAR

		Hal
2.1	Kerangka Konseptual	18
5.1	Hasil Uji Normalitas Data	32
5.2	Hasil Uji Heterokedastisitas	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1: Data Perusahaan	58
Lampiran 2: Statistik Deskriptif	60
Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik	61
Lampiran 4: Hasil Pengujian Hipotesis	64
Lampiran 5: Personalia Tenaga Peneliti dan Kualifikasi	66

I. Identitas Penelitian

1. Judul Usulan : Peran Good Corporate Governance Dalam

Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan BUMN Yang Listing di

Bursa Efek Indonesia

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkapb. Bidang Keahlianc. Akuntansi Keuangan

c. Jabatan Struktural : Sekretaris Lab. Pasar Modal FEB – UNG

d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

e. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

f. Alamat Surat

g. Telepon/Faks : 081233184157

h. E-Mail : <u>Amirlukum@gmail.com</u>

3. Tim Peneliti

No	NamadanGelar	BidangKeahli	Instan	Mata Kuliah Yang	Alokasiwak
		an	si	Diampu	tu
					(jam/mingg
					u)
1.	Amir Lukum,	Akuntansi	FEB	Pengantar Akuntansi	3,0
	S.Pd., MSA	Keuangan	UNG	Akuntansi Keuangan	3,0
				Akuntansi Sektor	3,0
				Publik	
2.	Rio Monoarfa,	Auditing	FEB	Auditing	3,0
	SE.Ak., M.Si	_	UNG	Akuntansi Keuangan	3,0
				Metodologi Penelitian	3,0

4. Subyek Penelitian : Perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek

Indonesia pada periode 2011 – 2013.

5. Masa Pelaksanaan : 3 Bulan

penelitian

6

Mulai : Oktober 2014 Berakhir : Desember 2014 Anggaran yang diusulkan : Rp. 5.000.000,-

(Lima JutaRupiah)

7 Lokasi Penelitian : Galeri Investasi BEI UNG

8 Hasil yang ditargetkan : Menjadi bahan referensi bagi semua pihak,

khususnya menjadi refensi bagi kalangan investor dalam memahami perusahaan BUMN sebelum menginvestasikan dananya, serta kalangan akademisi dalam mendalami pasar

modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan lingkungan semakin menjadi perhatian yang serius dalam pengelolaan perusahaan publik, baik oleh konsumen, investor maupun pemerintah. Ini dikarenakan dengan keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia.

Permasalahan lingkungan merupakan faktor penting yang harus segera dipikirkan mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan semakin nyata dewasa ini seperti kekeringan yang melanda beberapa daerah di pulau Jawa dimana masyarakat kesulitan dalam memperoleh air bersih, kebakaran di beberapa hutan lindung di pulau Sumatera, Riau dan Kalimantan, sampai dengan masalah lumpur bercampur gas sulfur di daerah Sidoarjo Jawa Timur sampai dengan sekarang tak terselesaikan merupakan bukti rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan dari aktifitas industrinya. Fakta ini merupakan implikasi, baik langsung maupun tidak langsung dari rendahnya dorongan dan tindakan proaktif manajemen lingkungan dari berbagai sektor industri di Indonesia.

Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu cara agar perusahaan tak terkecuali untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara atau biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola

usahanya tidak hanya untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) tetapi juga untuk pihak-pihak lain diluar perusahaan seperti pemerintah, lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat, para pekerja dan komunitas lokal atau yang sering disebut sebagai pihak *stakeholder*.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur pelaksanaan CSR dimana dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian pada tahun 2012 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Selain itu pengungkapan CSR juga telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2012 paragraf 9 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dinyatakan bahwa "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting."

Corporate Social Responsibility berkaitan erat dengan Good Corporate Governance (GCG) yang telah menjadi isu yang sangat global. CSR ini sejalan dengan salah satu prinsip dari empat prinsip utama GCG yaitu responsibility (Murwaningsari, 2009). UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 bagian C

menjelaskan bahwa selain menyampaikan tanggung jawab perusahaan berupa laporan keuangan, perusahaan pun wajib melaporkan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Program CSR di sini dapat membangun hubungan yang harmonis dan komunikasi efektif antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan dengan pengelolaan yang baik dan transparan, berarti sudah menerapkan implementasi GCG. GCG diharapkan tidak hanya terfokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga bagi *stakeholders*, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut.

Perusahaan dituntut secara hukum untuk menerapkan prinsip GCG seperti yang tersirat dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) yang sekarang diambil alih oleh lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan diantaranya: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.

Indikator GCG dalam penelitian ini diproksikan berdasarkan karakteristik dari GCG tersebut yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah ukuran dewan komisaris berperan terhadap *Corporate Social**Responsibility Disclosure?

- 2. Apakah komisaris independen berperan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- 3. Apakah kepemilikan manajerial berperan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- 4. Apakah kepemilikan pemerintah berperan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholders

Teori *stakeholders* menurut Freeman (1984) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan Chariri dan Ghazali (2007, h.32) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Sedangkan Darwin (2004) mengemukakan bahwa perusahaan dianggap sebagai *stakeholders*, jika mempunyai tiga atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi dan kepentingan.

Mengacu pada pengertian *stakeholders* diatas, maka dapat ditarik suatu penjelasan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam, yang kesemuanya dapat disebut sebagai *stakeholders*. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakehoders*-nya (Chariri dan Ghazali, 2007).

Menurut Hackston dan Milne (1996), *Stakeholders* dalam pelayanan sosial meliputi negara, sektor pivat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan

masyarakat. Dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama. Sementara mereka memiliki kepentingan berbeda-beda yang satu dengan yang lain bisa saling bersebrangan dan sangat mungkin merugikan pihak yang lain.

Menurut Utama (2010), bahwa tanggung sosial jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya agar memberikan dampak positif. Harahap (2002) dalam Nor Hadi (2011: 93) menjelaskan fenomena seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negatif externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi.

2.1.2 Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)

Corporate Social Responsibility atau CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan maupun sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab perusahaan di bidang hukum (Darwin, 2004). Hackson and Milne (1996) juga menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan atau organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pendapat Friedman dalam Suharto (2008) menyatakan bahwa tujuan utama

korporasi adalah memperoleh profit semata semakin ditinggalkan. Sebaliknya konsep *triple bottom line (profit, planet, people)* yang digagas oleh John Elkington makin masuk ke dalam *mainstream* etika bisnis (Suharto, 2008)

Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihakpihak yang berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab social
perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) adalah agar perusahaan
dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan
dalam periode tertentu. Penerapan CSR dapat diungkapkan perusahaan dalam
media laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang berisi laporan tanggung
jawab sosial perusahaan selama kurun waktu satu tahun berjalan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Gray *et al.* (1987) adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan. Jadi agar bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka hal tersebut perlu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Waryanto, 2010).

Darwin (2004) mengatakan bahwa dalam pelaporan CSR terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Kinerja sosial di dalamnya termasuk kepuasan pelanggan, karyawan, penyedia modal dan sektor publik. Kinerja lingkungan di dalamnya termasuk bahan baku, energi, air keragaman hayati, emisi sungai sampah, pemasok dan jasa, pelaksanaan dan angkutan. Kinerja sosial dibagi lagi menjadi empat kategori yaitu (1)praktik kerja yang terdiri dari kemamanan dan keselamatan tenaga kerja, pendidikan dan

training, kesempatan kerja (2) hak manusia yang terdiri dari strategi dan manajemen, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, tenaga kerja dibawah umur, kedisiplinan dan keamanan (3) Sosial terdiri dari komunitas, korupsi, kompetisi dan penetapan harga (4) Tanggung jawab terhadap produk terdiri dari kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang peduli terhadap hak pribadi.

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudit (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu). dalam penelitian ini mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kerangka yang dikembangkan dari Global Reporting Initiative (GRI) sebagai acuan dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility.

Menurut Pedoman Laporan Keberlanjutan (www.globalrepoting.org) kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Selain itu kerangka ini juga memperhatikan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan tersebar di berbagai lokasi. Kerangka Pelaporan GRI mengandung kandungan isi umum dan sektor secara spesifik yang telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi.

Peneliti ini menggunakan 6 indikator pengungkapan yaitu: ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk. Indikator-indikator yang terdapat di dalam GRI yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- 1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator)
- 2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator)
- 3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (*labor practices performance indicator*)
- 4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance indicator)
- 5. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator)
- 6. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance indicator)

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihakpihak yang berkepentingan tersebut. Adapun prinsip-prinsip GCG yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), yaitu:

1. Kerterbukaan (*transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kewajaran (fairness)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Independensi (*independency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Inti dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen

terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Pengimplementasian *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang mengikat di dalamnya.

2.1.4 Karakteristik Good Corporate Governance

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil *shareholder* didalam suatu entitas yang berbadan hukum perseroan terbatas. Selain sebagai wakil *shareholder*, dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan pengarahan pada pengelola perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Said dan Haron, 2009). Dengan wewenang yang dimilikinya, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab social perusahaan. Sebagai wakil dari prinsipal di dalam perusahaan, dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial, karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas. Dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, maka *image* perusahaan akan semakin baik (Gray *et al.*, 1995).

Dewan komisaris tentunya, menginginkan adanya peningkatan citra perusahaan kedepannya. Banyaknya jumlah dewan komisaris didalam entitas, maka akan menentukan pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab

social perusahaan. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Said dan Haron (2009) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (Chief Executive Officer) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Sitepu dan Siregar (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Komposisis dewan komisaris merupakan mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Dengan demikian komposisi dewan komisaris akan berdampak pada meningkatnya kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Komisaris Independen

Indriyani (2006) memaparkan perlunya memiliki Komisaris Independen, semata untuk mengintensifkan tugas Dewan Komisaris. Komisaris Independen dimaksudkan untuk mempertegas pengawasan Dewan Komisaris karena sesuai dengan peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-

339/BEJ/07-2001 tentang Peraturan Pencatatan efek Nomor I-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas butir C Nomor 2a, 2b, 2c, dan 2d, persyaratan untuk menjadi seorang Komisaris Independen adalah Komisaris Independen bebas dari konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham publik (minoritas) dan stakeholder lainnya.

Dalam konsern masyarakat, masyarakat adalah salah satu *stakeholder* yang kepentingannya perlu untuk dipertimbangkan, yang karena itu, untuk kepentingannya sendiri, seorang Komisaris Independen haruslah orang yang sedapat mungkin memahami kondisi masyarakat setempat yang alangkah baiknya memiliki akar setempat. Ini cukup penting, karena bagaimana jika perusahaan memutuskan untuk membuang limbah berbahaya ke udara atau air setempat dengan alasan belum adanya teknologi yang memadai atau harga yang terlalu mahal. Pada kasus seperti ini masyarakat menerima dampak buruk dari tidak terwakilinya kepentingan mereka dalam pertimbangan Direksi Perusahaan dan pengawasan Komisaris.

Alijoyo dan Zaini (2004) mengemukakan dua pokok tanggung jawab Komisaris Independen yang diantaranya menyebutkan bahwa seorang Komisaris Independen harus memastikan prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance (GCG) dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Adapun tugas-tugas seorang Komisaris Independen tersebut adalah pertama, menjamin tranparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Kedua, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain. Ketiga, diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar

dan adil. *Keempat*, kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. *Kelima*, menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Pengakuan adanya kepentingan stakeholder-stakeholder serta kemungkinan benturannya dengan kepentingan modal diakui dalam tugas seorang Komisaris Independen yang memerlukan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar atau ketika berdampak besar kepada masyarakat. Komisaris independen mempunyai akuntabilitas yang tinggi didalam melakukan pengawasan, semakin baik pengawasan sebuah perusahaan semakin baik kualitas pengungkapan informasi yang disampaikan. Penelitian Rustiarini (2010) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen Sujono dan Soebiantoro (2007) dalam Sabrina (2010). Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuat perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme kepemilikan manajerial sebagai struktur suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dengan outsider melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah.

4. Kepemilikan Pemerintah

Menurut Ghosh (2010) tipe kepemilikan perusahaan dibagi menjadi tiga tipe yaitu BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, mendefinisikan BUMN sebagai:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

- 3. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi criteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
- 4. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Kepemilikan pemerintah (government shareholding) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundangundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan logika diatas maka tekanan pemerintah dan publik memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan CSR. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Noviyanti (2009) menemukan hasil bahwa hanya tekanan publiklah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan CSR.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* telah banyak dilakukan di Indonesia dengan karakteristik perusahaan yang berbedabeda dan hasil penelitian yang beragam.

Sembiring (2005) berusaha untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta tahun 2002. Penelitian ini menggunakan variabel independen antara lain ukuran perusahaan, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitias, dan *leverage* perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

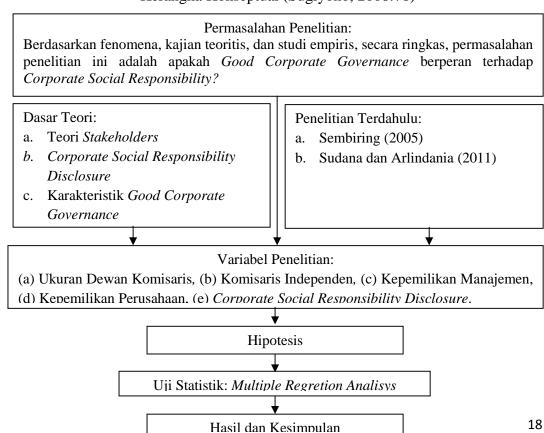
Penelitian yang dilakukan Sudana dan Arlindania (2011) dengan judul Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia. menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR yang berpengaruh pada keputusan perusahaan. Komisaris independen berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris,

sehingga jika jumlah anggota komisaris independen makin besar, maka akan semakin besar pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan agar penelitian ini dapat terarah secara sistematis dalam suatu alur metode penelitian yang baik, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai. Kerangka konsep penelitian secara komprehensif perlu dibangun dengan mendasarkan kepada fakta masalah yang ada, keterkaitan variabel secara teoritis, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, metodologi, metode analisis dan dengan keselarasan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, masalah dan tujuan penelitian dibuat kerangka konsep proses berpikir dalam penelitian ini yang diadopsi dari Sugiono (2008:78) secara komprehensif sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual (Sugiyono, 2008:78)



2.4 Hipotesis

- H₁: Dewan komisaris berperan terhadap *Corporate Social Responsibility*Disclosure pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
- H₂: Komisaris independen berperan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
- H₃: Kepemilikan Manajerial berperan terhadap *Corporate Social Responsibility*Disclosure
- H₅: Kepemilikan pemerintah berperan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu.

- Ingin mengetahui bagaimana peran ukuran dewan komisaris terhadap
 Corporate Social Responsibility Disclosure.
- 2. Ingin mengetahui bagaimana peran komisaris independen terhadap *Corporate*Social Responsibility Disclosure.
- 3. Ingin mengetahui bagaimana peran kepemilikan manajerial terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
- 4. Ingin mengetahui bagaimana peran kepemilikan pemerintah terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.

3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian empiris akuntansi keuangan mengenai *Corporate Social Responsibility* dan konsekuensinya terhadap lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada para pemakai informasi akuntansi dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami *Corporate Social Responsibility* sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan

perusahaan bagi penyelenggara perusahaan dan dapat membantu proses pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan (*size*), profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan pemerintah. Sedangkan variabel dependen adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*).

4.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar (*go public*) di Bursa Efek Indonesia seperti yang tercantum dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2011 sampai dengan 2013. Penggunaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai populasi karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang kepemilikannya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memiliki komitmen yang kuat dalam tanggung jawab social perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan juga relatif banyak memiliki dampak pada lingkungan secara langsung.

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan tahunan perusahaan yang lengkap selama tiga tahun amatan yaitu 2011 – 2013.
- Perusahaan BUMN yang tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan pada tahun pengamatan 2011 – 2013. karena perusahaan yang mengalami kerugian memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tanggung jawab social dan lingkungan.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan BUMN. Sehingga dengan demikian diperoleh jumlah sampel sebanyak 54 amatan perusahaan selama tiga tahun amatan dari 2011 sampai dengan 2013.

4.3 Jenis, Sumber, dan teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data yang telah tersedia sebagai sumber informasi. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan tahunan atau *annual report* dan laporan keuangan yang telah dipublikasikan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan.

4.4 Definisi Operasional Variabel

4.4.1 Variabel Dependen (*Corporate Social Responsibility Disclosure*)

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Corporate Social Responsibility Disclosure adalah data yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan (Hackston dan Milne, 1996). Global Reporting Initiative (GRI) digunakan sebagai indikator pengungkapan tanggung jawab sosial dengan total 79 item pengungkapan antara lain: 9 item pengungkapan dalam Aspek Ekonomi, 30 item pengungkapan dalam Aspek Lingkungan, 9 item pengungkapan dalam Aspek Hak Asasi Manusia, 14 pengungkapan dalam Aspek Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak, 9 item pengungkapan dalam Aspek Tanggung Jawab Produk, serta 8 item pengungkapan dalam Aspek Sosial.

Menurut Samy, et al. (2010) kerangka pelaporan GRI dapat diterima oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) secara umum untuk melaporkan pembangunan berkelanjutan perusahaan. World Business Council for Sustainable Development (1999) berpendapat bahwa kerangka pelaporan GRI merupakan pedoman yang diterima secara luas karena GRI memiliki prinsip-prinsip materialitas, inklusivitas pemangku kepentingan, kelengkapan dan konteks keberlanjutan (Samy et al., 2010). Metode analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR. Penghitungan CSRD dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak

diungkapkan (Haniffa *et. al.*, 2005), dalam Sayekti dan Wondabio (2007). Selanjutnya, skor dari setiap *item* dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRD adalah sebagai berikut:

$$CSDI_{j} = \frac{\sum X_{ij}}{n_{j}}$$

Dimana:

CSDIt : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j

nj: jumlah *item* untuk perusahaan j, nj = 79

Xij : 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, 0 < CSDIt < 1

4.4.2 Variabel Independen

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian adalah jumlah seluruh anggota yang duduk dalam dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat pada direksi. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilihat dari *annual report* masing-masing perusahaan.

2. Komisaris Independen

Variabel Independensi dewan komisaris dilihat dari proporsi komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris di perusahaan. Hasilnya berupa persentase yang dihitung dari rumus berikut:

Komisaris Independen = Jumlah anggota komisaris independen

Jumlah seluruh anggota dewan komisaris

25

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan jumlah seluruh saham perusahaan yang beredar. Variabel ini dihitung dengan rumus berikut:

4. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham Pemerintah Indonesia. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham perusahaan.

4.5 Teknik Analisis Data

4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

4.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi yaitu memenuhi syarat–syarat dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut harus teristribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedasitas agar memenuhi kriteria *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) sehingga dapat menghasilkan parameter penduga yang sahih

(Ghozali, 2006). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi

4.6 Hipotesis Statistik

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau terikat (Riduwan, 2010: 108). Adapun persamaan garis regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$CSRD = +b1 UDK + b2 KI + b3 KM + b4 KP + e$$

Keterangan:

CSRD = Corporate Social Responsibility Disclosure

UDK = Ukuran Dewan Komisaris

KI = Komisaris Independen

KM = Kepemilikan Manajerial

KP = Kepemilikan Pemerintah

= Intercept

b1,...,b4 = Koefisien regresi

e = Error

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menguji peran good corporate governance terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan badan usaha milik negara yang terdaftar di bursa efek indonesia. Untuk variabel independen adalah karakaterisitik dari good corporate governance yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komisari independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility disclosure. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilihat dari annual report masing-masing perusahaan, komisaris independen diukur dengan proporsi komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris di perusahaan, kepemilikan manajerial dilihat dari persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajer, dan kepemilikan pemerintah diukur dengan persentase kepemilikan pemerintah dari perusahaan BUMN. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu corporate social responsibility disclosure diukur dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et. al., 2005), dalam Sayekti dan Wondabio (2007). Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan (Terlampir). Penelitian ini mengambil sampel perusahaan-perusahaan BUMN yang *listed* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

dengan menggunakan kriteria khusus sehingga dari 20 perusahaan BUMN yang listed di BEI didapatkan sampel sebanyak 16 perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria khusus tersebut yaitu:

Tabel 5.1
Perusahaan BUMN Yang Dijadikan Sampel

No	Kode	Nama perusahaan
1	INAF	PT Indofarma (persero) Tbk
2	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
3	PGAS	PT perusahaan gas negara (persero) Tbk
4	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
5	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
6	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
7	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
8	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
9	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
10	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
11	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
12	TINS	PT Timah (Persero) Tbk.
13	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
14	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
15	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
16	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2014

5.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian seperti ukuran dewan komisari, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah dan

corporate social responsibility disclosure. Statistik deskriptif untuk variabelvariabel penelitian tersebut dapat kita dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.2
Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan_Komisaris	48	2.00	5.00	3.4375	.87291
Kom_Independen	48	40.00	200.00	73.3750	41.21589
Kepemilikan_Manajerial	48	.00	1.00	.1827	.26828
Kepemilikan_Pemerintah	48	51.00	90.03	64.6698	11.17565
CSRD	48	19.77	26.18	23.4442	1.85582
Valid N (listwise)	48				

Tabel diatas menggambarkan deskripsi variabel-variabel secara statistic dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.

berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Ukuran dewan komisaris mempunyai nilai minimum 2, nilai maksimum 5, dengan nilai mean sebesar 3.4374 dan standar deviasi 0.87291. dilihat dari data tersebut jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan yang dijadikan sampel rata-rata diatas tiga orang berdasarkan nilai mean yang diperoleh atau paling banyak perusahaan mempunyai dewan komisaris lebih dari tiga orang walaupun ada juga jumlah dewan komisarisnya hanya berjumlah dua.

Komisaris independen mempunyai nilai minimum 40, nilai maksimum 200, dengan nilai mean sebesar 73.3750 dan standar deviasi 41.21589. Dari statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota komisaris independen sudah baik dimana proporsi jumlah komisaris independen dari jumlah dewan komisaris pada perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian ini paling sedikit 40% dari jumlah dewan komisaris perusahaan. Bahkan ada perusahaan yang komisaris independennya sampai 200% proporsinya dari jumlah anggota dewan komisaris.

Kepemilikan manajerial mempunyai nilai minimum 0.00, nilai maksimum 1.00, dengan nilai mean sebesar 0.1827 dan standar deviasi 0.26828. berdasarkan statistik tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata kepemilikan saham oleh manajerial tidak sampai satu persen dari jumlah saham yang beredar.

Kepemilikan pemerintah mempunyai nilai minimum 51.00, nilai maksimum 90.03, dengan nilai mean sebesar 64.6698 dan standar deviasi 11.17565. berdasarkan statistik tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata kepemilikan pemerintah atas perusahaan diatas 50%.

corporate social responsibility disclosure mempunyai nilai minimum 34.00, nilai maksimum 65.00, dengan nilai mean sebesar 46.8333 dan standar deviasi 8.83336. berdasarkan data statistik tersebut tingkat pengungkapan corporate social responsibility masih terbilang cukup kecil dimana rata-rata pengungkapan corporate social responsibility oleh perusahaan yang diobservasi hanya 46.83% dari 79 item yang digunakan sebagai indikator pengungkapan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan Global Reporting Initiative (GRI).

5.3 Uji Asumsi Klasik

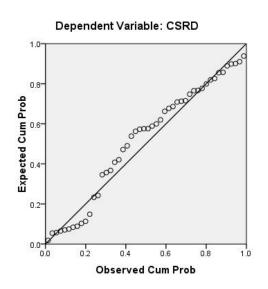
Data yang telah diperoleh sebelum dilakukan uji hipotesis, maka data harus diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik untuk mendapatkan data yang berkualitas. Berikut hasil dari pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan.

1. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan kurva persebaran data berupa *curve* normal untuk mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Ada dua asumsi yaitu pertama, jika data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kedua, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi nonrmalitas. Berikut hasil uji normalitas data

Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas Data

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga dengan demikian maka data yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan kurva persebaran data berupa *curve* normal, pengujian normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) dimana Apabila nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H0 ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal, namun jika nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov test.

Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Dewan_				
		Komisari	Kom_Ind	Kepemilikan_	Kepemilikan_	
		S	ependen	Manajerial	Pemerintah	CSRD
N		48	48	48	48	48
Normal Parameters ^a	Mean	3.4375	73.3750	.1827	64.6698	23.4442
	Std. Deviation	.87291	41.2158 9	.26828	11.17565	1.85582
Most Extreme	Absolute	.303	.311	.248	.137	.171
Differences	Positive	.197	.311	.239	.137	.126
	Negative	303	223	248	111	171
Kolmogorov-Smirnov Z		2.098	2.158	1.718	.947	1.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.235	.187	.214	.331	.122

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Signifikansi* untuk masing-masing variabel diatas 0.05 yang berarti data

berdistribusi normal. dengan demikian maka asumsi normalitas data terpenuhi dan data yang digunakan dapat dilakukan pengujian tahap selanjutnya.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflasion factor* (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai *tolerance* diatas 1 dan VIF di atas 10. Jika telah memenuhi kriteria asumsi klasik, maka baru dilakukan analisis regresi untuk kepentingan pengujian hipotesis. Berikut hasil pengujian multikolinieritas data.

Tabel 5.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics		
	Model	Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Dewan_Komisaris	.264	3.788	
	Kom_Independen	.339	2.946	
	Kepemilikan_Manajerial	.923	1.084	
	Kepemilikan_Pemerintah	.636	1.572	

a. Dependent Variable: CSRD

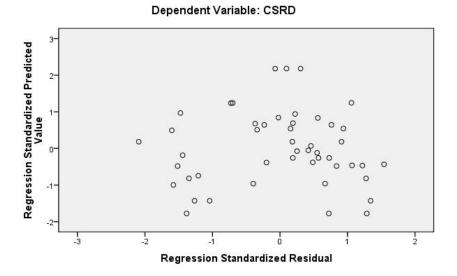
Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah mempunyai nilai *tolerance* dibawah 1 dan nilai VIF dibawah 10. Dengan demikian antara keempat variabel diatas tidak terjadi multikolinieritas,

sehingga asumsi ini terpenuhi dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis selanjutnya.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik diagram pencar (scatter diagram). Bila dalam scatter diagram ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.. Pemilihan model grafik ini dilakukan karena dalam model ini variabel bebasnya lebih dari satu. Berikut hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan.

Gambar 5.2
Hasil Uji Heterokedastisitas
Scatterplot



Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y yang tidak membentuk suatu pola yang sistematis, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan demikian model regresi tersebut layak dipakai sebagai variabel prediktor terhadap variabel Y dan data yang digunakan dapat dilakukan pengujian pada tahapan selanjutnya.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Secara logika, autokorelasi akan muncul apabila data sesudahnya merupakan fungsi dari data sebelumnya, atau data sesudahnya memliki korelasi yang tinggi dengan data sebelumnya pada data runtut waktu dan besaran data sangat tergantung pada tempat data tersebut terjadi.

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *statistic*Durbin Watson untuk mengetahui apakah suatu model regresi terdapat autokorelasi. Nilai Durbin-Watson akan dibandingkan dengan nilai dalam tabel Durbin-Watson untuk mendapatkan batas bawah bawah (DL) dan batas atas (DU) dengan tingkat signifikansi = 5 %. Berikut tabel hasil pengujian autokorelasi.

Tabel 5.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson	
1	1.943	

a. Predictors: (Constant),

Kepemilikan_Pemerintah,

Kepemilikan_Manajerial,

Kom_Independen, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: CSRD

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai D-W sebesar 1,943. Sedangkan nilai du diperoleh sebesar 1,7206. Dengan demikian diperoleh bahwa nilai D-W berada diantara dU yaitu 1,7206 dan 4 – du yaitu 2,2794. Dengan demikian menunjukkan bahwa model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi.

Dari empat pengujian asumsi klasik diatas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan dapat dilakukan pengujian regresi.

5.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi yaitu analisis regresi berganda. (Sugiyono, 2012: 270). Untuk pengujian hipotesis pertama sampai pengujian hipotesis keenam menggunakan uji-t. Berikut hasil pengujian hipotesis.

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pada bagian ini model regresi berganda diterapkan untuk menguji pengaruh keenam variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah terhadap variabel dependen (corporate social responsibility disclosure). Model tersebut dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$CSRD = +b1 DK + b2 KI + b3 KM + b4 KP + e$$

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam model regresi berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan nilai signifikansinya dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dalam hal ini, nilai t-tabel adalah sebesar 1,67722. Berikut hasil pengujian uji-t.

Tabel 5.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

Coefficients^a

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. Error Model В Beta t Sig. .000 25.592 (Constant) 4.111 6.225 3.272 Dewan_Komisaris .260 .605 .853 .002 .224 .476 2.085 Kom_Independen .011 .043 Kepemilikan_Manajerial .130 1.027 .048 .322 .749

.391

.028

.505

3.231

.002

Kepemilikan_Pemerintah

a. Dependent Variable: CSRD

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa, hasil uji-t untuk variabel ukuran dewan komisaris (X1) terhadap *corporate social responsibility disclosure* (Y) diperoleh nilai t-hitung sebesar 3.272 yang berarti lebih besar dari t-tabel 1. 67722, dengan nilai probabilitas (p) 0.002 yaitu lebih kecil dari 0.05. maka dengan demikian untuk hipotesis pertama diterima yang berarti ukuran dewan komisaris berperan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Hasil uji-t variabel komisaris independen (X2) terhadap *corporate social* responsibility disclosure (Y) diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.085 yang berarti lebih besar dari t-tabel 1. 67722, dengan nilai probabilitas (p) 0.043 yaitu lebih kecil dari 0.05. maka dengan demikian untuk hipotesis kedua diterima yang berarti komisaris independen berperan terhadap *corporate social responsibility* disclosure.

Hasil uji-t variabel kepemilikan manajerial (X3) terhadap *corporate social* responsibility disclosure (Y) diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.322 yang berarti lebih kecil dari t-tabel 1. 67722, dengan nilai probabilitas (p) 0.749 yaitu lebih kecil dari 0.05. maka dengan demikian untuk hipotesis ketiga ditolak yang berarti kepemilikan manajerial tidak berperan terhadap *corporate social responsibility* disclosure.

Kemudian hasil uji-t variabel kepemilikan pemerintah (X4) terhadap corporate social responsibility disclosure (Y) diperoleh nilai t-hitung sebesar 3.231 yang berarti lebih besar dari t-tabel 1. 67356, dengan nilai probabilitas (p) 0.002 yaitu lebih kecil dari 0.05. maka dengan demikian untuk hipotesis keempat diterima yaitu kepemilikan pemerintah berperan terhadap corporate social responsibility disclosure.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka persamaan regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

$$CSRD = 25.592 + 0.260 + 0.224 + 0.130 + 0.391 + e$$

Nilai koefisien regresi variabel ukuran dewan komisaris (X1) dapat di interpretasikan sebesar 0.260 yang dapat dideskripsikan bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada variabel *corporate social responsibility disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel ukuran dewan komisaris sebesar 26%. Sedangkan sisanya sebesar 74% dapat dijelaskan oleh variabel lain

Nilai koefisien regresi variabel komisaris independen (X2) dapat di interpretasikan sebesar 0.224 yang dapat dideskripsikan bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada variabel *corporate social responsibility disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel komisaris independen sebesar 22.4%. Sedangkan sisanya sebesar 77.6% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (X3) dapat di interpretasikan sebesar 0.130 yang dapat dideskripsikan bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada variabel *corporate social responsibility disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial sebesar 13%. Sedangkan sisanya sebesar 87% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Serta nilai koefisien regresi variabel kepemilikan pemerintah (X3) dapat di interpretasikan sebesar 0.391 yang dapat dideskripsikan bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada variabel *corporate social responsibility disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan pemerintah sebesar 39.1%. Sedangkan sisanya sebesar 60.9% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji signifikansi simultan (Uji-F) digunakan untuk menguji hipotesis ketiga dengan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Analisis menggunakan uji-F menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikansi terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji signifikansi simultan.

Tabel 5.7
Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^b

Mode	el	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.308	4	11.397	4.762	.000ª
	Residual	141.563	43	3.292		
	Total	161.871	47			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Pemerintah, Kepemilikan_Manajerial, Kom_Independen, Dewan_Komisaris

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengujian secara simultan antara variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah terhadap variabel *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh secara positif dan signifikan. Ini dapat dilihat dari nilai F-hitung yaitu sebesar 4.762 yang lebih besar dari F-tabel 2.57 (terlampir) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian variabel dependen yang terdiri dari variabel ukuran perusahaan, profitabiltas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan pemerintah secara simultan berperan positif dan signifikan terhadap

b. Dependent Variable: CSRD

corporate social responsibility disclosure pada perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa efek indonesia.

3. Uji Koefisien Determinasi

Setelah dilakukan pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji-F dan pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji-t, kemudian dilakukan uji Koefisien determinasi R² untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Apabila dikalikan dengan 100% akan diperoleh persentase sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel dependen.

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Bias yang dimaksudkan adalah setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R2 akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Ghozali (2006) mengatakan bahwa disarankan menggunakan nilai *adjusted R2* pada saat mengevaluasi model regresi yang baik, hal ini dikarenakan nilai *adjusted R2* dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi negatif. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi R².

Tabel 5.8 Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585 ^a	.342	.258	1.81443

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Pemerintah,

Kepemilikan_Manajerial, Kom_Independen, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: CSRD

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian untuk R_{Square} mempunyai nilai R sebesar 0.585 dengan Adjusted R_{Square} 0.258 atau sebesar 25.8%. Ini berarti bahwa variabel *good corporate governance* yang dilihat dari ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel *corporate social responsibility disclosure* yaitu sebesar 0.585 atau 58.5%, serta mampu menjelaskan tentang *corporate social responsibility disclosure* sebesar 0.258 atau 25.8%. Sedangkan sisanya sebesar 74.2% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

5.5 Pembahasan

5.5.1 Ukuran Dewan Komisaris Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan yaitu untuk mengawasi pengelola perusahaan atau manajemen bertindak dengan benar. Dewan Komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa ukuran dewan komisaris berperan positif dan signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan dewan komisaris sebagai wakil dari prinsipal di dalam perusahaan dapat memperani luasnya pengungkapan *corporate social responsibility*, karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas. Dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, maka *image* perusahaan akan semakin baik (Gray *et al.*, 1995).

Selain itu dewan komisaris tentunya, menginginkan adanya peningkatan citra perusahaan kedepannya. Banyaknya jumlah dewan komisaris didalam entitas, maka akan menentukan perannya terhadap pengungkapan *corporate social*

responsibility. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Said dan Haron (2009) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (Chief Executive Officer) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan corporate social responsibility, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sembiring (2005) yang hasil penelitiannya bahwa ukuran dewan komisaris berperan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

5.5.2 Komisaris Independen Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen memiliki peran penting bagi perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan komisaris dapat memperani efektivitas dewan.

Komisaris Independen dimaksudkan untuk mempertegas pengawasan Dewan Komisaris karena sesuai dengan peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tentang Peraturan Pencatatan efek Nomor I-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas butir C Nomor 2a, 2b, 2c, dan 2d, persyaratan untuk menjadi seorang Komisaris Independen adalah Komisaris Independen bebas dari konflik kepentingan yang

mungkin terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham publik (minoritas) dan stakeholder lainnya serta jumlah komisaris independen minimum 30%. Lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa komisaris independen berperan secara positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam konsern masyarakat, masyarakat adalah salah satu *stakeholder* yang kepentingannya perlu untuk dipertimbangkan, yang karena itu, untuk kepentingannya sendiri, seorang Komisaris Independen haruslah orang yang sedapat mungkin memahami kondisi masyarakat setempat yang alangkah baiknya memiliki akar setempat. Ini cukup penting, karena bagaimana jika perusahaan memutuskan untuk membuang limbah berbahaya ke udara atau air setempat dengan alasan belum adanya teknologi yang memadai atau harga yang terlalu mahal. Pada kasus seperti ini masyarakat menerima dampak buruk dari tidak terwakilinya kepentingan mereka dalam pertimbangan Direksi Perusahaan dan pengawasan Komisaris.

Pengakuan adanya kepentingan stakeholder-stakeholder serta kemungkinan benturannya dengan kepentingan modal diakui dalam tugas seorang Komisaris Independen yang memerlukan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar atau ketika berdampak besar kepada masyarakat.

Komisaris independen mempunyai akuntabilitas yang tinggi didalam melakukan pengawasan, semakin baik pengawasan sebuah perusahaan semakin baik kualitas pengungkapan informasi yang disampaikan.

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan dan mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arlindania (2011) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen berperan positif terhadap pengungkapan CSR yang berperan pada keputusan perusahaan. Komisaris independen berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris, sehingga jika jumlah anggota komisaris independen makin besar, maka akan semakin besar pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan.

5.5.3 Kepemilikan Manajerial Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure

Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) merupakan salah satu faktor GCG yang berpengaruh untuk pelaksanaan CSR (Rustiarini, 2009). Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan.

Faisal (2004), Wahidawati (2001), Born (1988) dalam Junaidi (2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat.

Jensen & Meckling (1976) menganalisis bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara pihak manajer yang menikmati manfaat dan pihak luar yang tidak menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, peningkatan kepemilikan manajemen akan mengurangi *agency difficulties* melalui pengurangan insentif untuk mengkonsumsi manfaat/keuntungan dan mengambil alih kekayaan pemegang saham. Pengurangan ini sangat potensial dalam misalokasi *resources*, yang pada gilirannya untuk peningkatan nilai perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. Namun alam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan muncul permasalahan yang akan timbul di antara prinsipal dan agen atau antara pemegang saham dan manajer.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berberan dalam *corporate social* responsibility disclosure. Hal ini dikarenakan Konflik kepemilikan antara manajer

dengan pemilik menjadi semakin basar ketika kapemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jansen & Meckling, 1997).

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada statistik deskriptif bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajer sangat kecil yaitu rata-rata dalam perusahaan yang diobservasi kepemilikan saham oleh manajemen tidak lebih dari satu persen dari jumlah saham yang beredar. Hal ini dapat menjadi penyebab tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer, dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.

5.5.4 Kepemilikan Pemerintah Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan *corporate social responsibilty* (CSR): lingkungan dan sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya.

Secara teoritis, tanpa diwajibkan perusahaan akan dengan sendirinya membuat laporan kepada *stakeholders* karena perusahaan tersebut akan terkena sanksi dari *stakeholders* bila tidak membuat laporan CSR. Sebagai contoh, jika perusahaan tidak mempublikasi laporan CSR maka para investor akan memberi sanksi dalam bentuk keengganan mereka untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Keengganan ini akan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut jatuh, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Para konsumen dapat memboikot produk perusahaan tersebut dan pemasok tidak menyalurkan bahan baku ke perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan beroperasi. Sanksi yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan menyebabkan perusahaan akan mempunyai insentif untuk menghasilkan laporan CSR.

Pelaporan CSR yang sifatnya suka rela dapat tidak terjadi karena belum tentu *stakeholders* termotivasi memberikan sanksi dan kalaupun ada yang memberi sanksi dampaknya tidak langsung dan tidak signifikan berperan terhadap kinerja perusahaan. Kondisi ini menjustifikasi diwajibkannya perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan laporan CSR. Justifikasi lain atas perlu diwajibkannya pelaporan CSR adalah, berbeda dengan pemilik modal yang melalui suatu kontrak dapat mewajibkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan, *stakeholders* lain (seperti konsumen, karyawan, publik) tidak mempunyai kekuatan (*power*) untuk mewajibkan perusahaan menghasilkan laporan CSR (Utama, 2007).

Kepemilikan pemerintah (government shareholding) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini

pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundangundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah berperan positif dan signifikan terhadap corporate social responsibility disclosure pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Faktor kepemilikan saham pemerintah berperan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya bahwa semakin besar tingkat persentase kepemilikan saham pemerintah, maka semakin luas pula pengungkapan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan. Hasil ini memberikan arti bahwa pemerintah mengawasi dan memperhatikan kinerja perusahaan.Kinerja ini tercermin dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk didalamnya pelaporan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR dalam

laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Tekanan pemerintah dan publik memiliki peran terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan CSR.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

- 1. Ukuran dewan komisaris berperan positif dan signifikan terhadap *corporate* social responsibility disclosure pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan dewan komisaris sebagai wakil dari prinsipal di dalam perusahaan dapat memperani luasnya pengungkapan *corporate social responsibility*, karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas.
- 2. Komisaris independen berperan secara positif dan signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam konsern masyarakat, masyarakat adalah salah satu stakeholder yang kepentingannya perlu untuk dipertimbangkan, yang karena itu, untuk kepentingannya sendiri, seorang Komisaris Independen haruslah orang yang sedapat mungkin memahami kondisi masyarakat setempat yang alangkah baiknya memiliki akar setempat.
- 3. Kepemilikan manajerial tidak berberan dalam *corporate social responsibility* disclosure. Hal ini dikarenakan Konflik kepemilikan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin basar ketika kapemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jansen & Meckling,1997). Dalam hal ini manajer

- akan berusaha untuk memaksimalkan kapentingan dirinya di bandingkan kepentingan perusahaan.
- 4. kepemilikan pemerintah berperan positif dan signifikan terhadap *corporate* social responsibility disclosure pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Faktor kepemilikan saham pemerintah berperan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya bahwa semakin besar tingkat persentase kepemilikan saham pemerintah, maka semakin luas pula pengungkapan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan.

6.2 Implikasi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan khususnya: Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam merumuskan kebijakan, peraturan dan standar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selain itu bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hendaknya terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan karena BUMN yang kepemilikannya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah harusnya menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam pengungkapan pertanggung jawaban sosial karena ternyata pada perusahaan yang terdaftar di BEI masih dapat dikatakan rendah dan belum semua mengikuti standar yang di keluarkan oleh GRI.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain sebagai berikut:

- Data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa data laporan tahunan perusahaan sehingga tidak semua item di dalam daftar pengungkapan sosial di ungkapkan secara jelas sebagaimana di dalam laporan keberlanjutan.
- Periode penelitian yang digunakan hanya tiga tahun pengamatan sehingga memungkinkan praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diamati kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

6.4 Saran

Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang dikemukakan sebagai berikut:

- Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas dan dengan data perusahaan dalam industri yang sama. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan dari peneliti tersebut memiliki cakupan yang lebih luas serta dapat dilihat perbandingan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam satu industri yang sama.
- Item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya senantiasa di perbaharui sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius dan Zaini, Subarto. 2004. *Komisaris Independen*. Jakarta: PT Indeks.
- Amran, Azlan dan S. Susela Devi. 2008. The Impact Of Government And Foreign Affiliate Influence On Corporate Social Reporting (The Case Of Malaysia). *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 23, No. 4, hal. 386-404
- Darwin, Ali. 2004. Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia. *Economics Business and Accounting Review*, 3: 83-95.
- Ghosh, S. 2010. Firm Ownership Type, Earnings Management and Auditor Relationships: Evidence from India. *MPRA Paper No. 30322, posted 23. April 2011*
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. GRI Sustainability Reporting Guidelines G3. Diambil dari: www.globalreporting.org
- Gray, R., R. Kouhy, dan S. Lavers. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting. A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, Hal. 47-77
- Gray, Rob, Muhammad Javad, David M. Power dan C. Donald Sinclair. 2001. Social And Environmental Disclosure and Corporare Characteristics: A Research Note and Extension. *Journal of Business Finance and Accounting*. 327 356.
- Hackston, David & Markus J. Milne. (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, p. 77-108.
- Harahap, Sofyan Safri., (2002). *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 1 Juni 2012. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriyani, Atik . 2006. *Keberadaan Komisaris Independen Dalam Perseroan*. Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 2, Nomor 1.
- Murwaningsari, Etty. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. Dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1): h:30-41.

- Noviyanti, R.B., 2008. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kasus Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. . *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor
- Nugroho, Yanuar. 2007. Dilema Tanggung Jawab Korporasi Kumpulan Tulisan.www.unisosdem.org
- Republik Indonesia. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Corporate Social Responsibility.
- Rustiarini, Ni Wayan. 2010. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Dalam *Jurnal Riset Akuntansi*, h:1-24.
- Said, Zainuddin dan Haron. 2009. The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance Characteristics In Malaysian Public Listed Company. *Emerald Group Publishing Limited*, Vol. 5 No. 2 2009, pp. 212-226.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Sitepu, Andre, Christian. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Thesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Sudana, I Made dan Putu Ayu Arlindania W. 2011. Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia. Dalam *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 4(1): h:37-49.
- Suharto, Harry. 2008. Standar Akuntansi Lingkungan: Kebutuhan Mendesak. *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 4-5.
- Waryanto, 2010. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Thesis*. Pascasarjana UNDIP.

LAMPIRAN 1:

DATA PERUSAHAAN

	INISIAL	DEWAN	KOMISARIS	KEPEMILIKAN	KEPEMILIKAN	
TAHUN	PERUSAHAAN	KOMISARIS	INDEPENDEN	MANAJERIAL	PEMERINTAH	CSRD (%)
		(ORANG)	(%)	(%)	(%)	
2011	ADHI	4	50	0.0004	52.28	0.49
	ANTM	4	50	0.099	65.00	0.49
	BBNI	2	200	0.00004	60.00	0.49
	BMRI	3	133	0.09	60.00	0.64
	GIAA	3	67	0.81	69.14	0.41
	INAF	2	100	0.12	80.66	0.41
	JSMR	4	50	0.147	70.00	0.41
	KAEF	2	100	0.00005	90.03	0.48
	KRAS	3	67	0.00022	80.00	0.48
	PGAS	4	50	0.00004	56.96	0.48
	PTBA	5	40	0.812	65.02	0.43
	PTPP	3	67	0.276	51.00	0.43
	SMGR	4	50	0.646	51.01	0.43
	TINS	4	50	0.35	65.00	0.60
	TLKM	4	50	0.14	53.24	0.60
	WIKA	4	50	0.838	66.37	0.60
2012	ADHI	4	50	0.0004	51.00	0.37
	ANTM	4	50	0.0009	65.00	0.37
	BBNI	2	200	0.0023	60.00	0.37
	BMRI	3	133	0.08	60.00	0.47
	GIAA	3	67	0.26	69.14	0.50
	INAF	2	100	0.19	80.66	0.50
	JSMR	4	50	0.0036	70.00	0.50
	KAEF	2	100	0.000023	90.02	0.49

	KRAS	3	67	0.0015	80.00	0.49
	PGAS	4	50	0.000007	56.97	0.49
	PTBA	5	40	0.00002	65.01	0.51
	PTPP	3	67	0.076	51.00	0.51
	SMGR	4	50	0.07	51.01	0.51
	TINS	4	50	0.35	65.00	0.65
	TLKM	4	50	0.15	53.90	0.65
	WIKA	4	50	0.838	65.51	0.65
2013	ADHI	4	50	0.0004	51.00	0.35
	ANTM	4	50	0.999	65.00	0.35
	BBNI	2	200	0.0021	60.00	0.35
	BMRI	3	133	0.096	60.00	0.45
	GIAA	3	67	0.25	69.14	0.40
	INAF	2	100	0.19	80.66	0.40
	JSMR	4	50	0.0027	70.00	0.40
	KAEF	2	100	0.000023	90.02	0.41
	KRAS	3	67	0.0015	80.00	0.41
	PGAS	4	50	0.000007	56.97	0.41
	PTBA	5	40	0.00002	65.01	0.44
	PTPP	3	67	0.058	51.00	0.44
	SMGR	4	50	0.099	51.01	0.44
	TINS	4	50	0.35	65.00	0.34
	TLKM	4	50	0.18	53.90	0.34
	WIKA	4	50	0.187	65.51	0.34

LAMPIRAN 2:

STATISITIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan_Komisaris	48	2.00	5.00	3.4375	.87291
Kom_Independen	48	40.00	200.00	73.3750	41.21589
Kepemilikan_Manajerial	48	.00	1.00	.1827	.26828
Kepemilikan_Pemerintah	48	51.00	90.03	64.6698	11.17565
CSRD	48	19.77	26.18	23.4442	1.85582
Valid N (listwise)	48				

LAMPIRAN 3:

UJI ASUMSI KLASIK

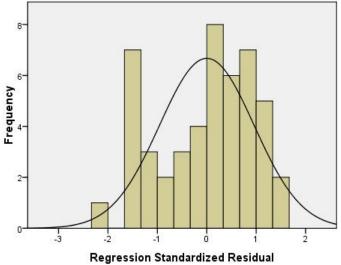
1. HASIL UJI NORMALITAS DATA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One dample romogorov diminov rest						
		Dewan_				
		Komisari	Kom_Ind	Kepemilikan_	Kepemilikan_	
		S	ependen	Manajerial	Pemerintah	CSRD
Ν		48	48	48	48	48
Normal Parameters ^a	Mean	3.4375	73.3750	.1827	64.6698	23.4442
	Std. Deviation	.87291	41.2158 9	.26828	11.17565	1.85582
Most Extreme	Absolute	.303	.311	.248	.137	.171
Differences	Positive	.197	.311	.239	.137	.126
	Negative	303	223	248	111	171
Kolmogorov-Smirnov Z		2.098	2.158	1.718	.947	1.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.235	.187	.214	.331	.122
a. Test distribution is	Normal.					

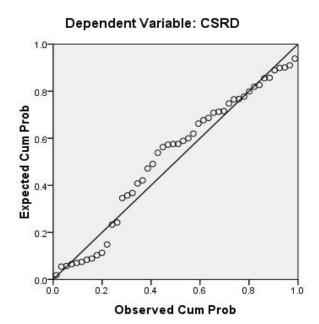
Histogram

Dependent Variable: CSRD



Mean =2.64E-15 Std. Dev. =0.957 N =48

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2. HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

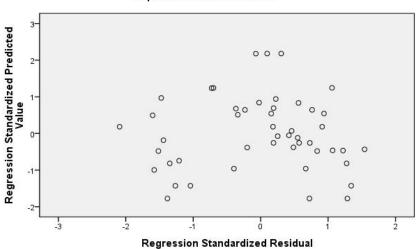
		Collinearity Statistics		
	Model	Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Dewan_Komisaris	.264	3.788	
	Kom_Independen	.339	2.946	
	Kepemilikan_Manajerial	.923	1.084	
	Kepemilikan_Pemerintah	.636	1.572	

a. Dependent Variable: CSRD

3. HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: CSRD



4. HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.943

a. Predictors: (Constant),

Kepemilikan_Pemerintah,

Kepemilikan_Manajerial,

Kom_Independen, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: CSRD

LAMPIRAN 4:

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kepemilikan_Pemerintah, Kepemilikan_Manajerial, Kom_Independen, Dewan_Komisaris ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: CSRD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585 ^a	.342	.258	1.81443

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Pemerintah,

Kepemilikan_Manajerial, Kom_Independen, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: CSRD

ANOVA^b

Mode	lodel Sum of Squares Df Mean Squa		Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	20.308	4	11.397	4.762	.000 ^a
	Residual	141.563	43	3.292		
	Total	161.871	47			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Pemerintah, Kepemilikan_Manajerial, Kom_Independen, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: CSRD

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
M	odel	B Std. Error		Beta	t	Sig.
1	(Constant)	25.592	4.111		6.225	.000
	Dewan_Komisaris	.260	.605	.853	3.272	.002
	Kom_Independen	.224	.011	.476	2.085	.043
	Kepemilikan_Manajerial	.130	1.027	.048	.322	.749
	Kepemilikan_Pemerintah	.391	.028	.505	3.231	.002

a. Dependent Variable: CSRD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	22.2762	24.8772	23.4442	.65734	48
Residual	-3.79592	2.79559	.00000	1.73551	48
Std. Predicted Value	-1.777	2.180	.000	1.000	48
Std. Residual	-2.092	1.541	.000	.957	48

a. Dependent Variable: CSRD

LAMPIRAN 5: PERSONALIA TENAGA PENELITI DAN KUALIFIKASI

I. Biodata Ketua TimPeneliti

1	Nama Lengkap	:	Amir Lukum, S.Pd., MSA
2	Alamat Lengkap	:	Jl. Semangka Perum Citra Garden Blok H1 Kel. Libuo
			Kec. Dungingi, Gorontalo
3	Nomor Telp	:	085240084337

4. RiwayatPendidikan

Jenjang	Nama PT	Kota/Negara	Gelar	Tahun	Bidang
				Selesai	Studi
Sarjana	Universitas Negeri	Gorontalo	S.Pd	2007	Pend.
	Gorontalo				Akuntansi
Magister	Universitas Brawijaya	Malang	MSA	2010	Akuntansi
Doktor	-	-	-	-	-

5. PengalamanPenelitian

No	JudulPenelitian	Sponsor	Tahun
1.	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap	PNBP Fakultas	2011
	Senjangan Anggaran Dengan Komitmen	Ekonomi dan Bisnis	
	Organisasi Sebagai Moderasi Pada Pemerintah		
	Provinsi Gorontalo.		
2.	Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran	PNBP Universitas	2012
	Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi pada	Negeri Gorontalo	
	Universitas Negeri Gorontalo		
3.	Pengaruh Economic Value Added dan Laporan	PNBP Fakultas	2013
	Arus Kas Operasional Perusahaan Terhadap	Ekonomi UNG	
	Return Saham Pada Perusahaan Perbankan		
	Yang Listing di Bursa Efek Indonesia		

6. Publikasi

No	JudulArtikel	Artikel NamaJurnal		Status
110	JuduiArtikei	Namajurnai	danNomor	Akreditasi
1.	Budaya dan Pengaruhnya	Jurnal Kebijakan	Edisi	Tidak
	Terhadap Sistem Akuntansi	Publik, UNG	XVII/Juni	Terakreditasi
	(Sebuah Telaah Kritis)		2011	
2.	Economic Value Added dan	Jurnal Oikos-	Vol. 7,	Tidak
	Laporan Arus Kas Operasional	Nomos (Jurnal	Nomor 2 /	Terakreditasi
	Perusahaan Terhadap Return	Kajian Ekonomi	Mei 2014	
	Saham Perbankan Go Publik	dan Bisnis)		

Gorontalo, November 2014

Amir Lukum, S.Pd., MSA

NIP. 19840501 201012 1 007

II. BiodataAnggotaPeneliti

1.	NamaLengkap	:	Rio Monoarfa, SE.Ak., M.Si
2.	AlamatLengkap	:	Jl. Apel 1, Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi
3.	NomorTelp	:	

4. RiwayatPendidikan

Jenjang	Nama PT	Kota/Negara	Gelar	Tahun Selesai	BidangStudi
Sarjana	Universitaas	Manado/	Sarjana	1997	Akuntansi
	Sam Ratulangi	Indonesia	Ekonomi,		
			Akuntan		
Magister	Universitas	Bandung/	Magister	2010	Akuntansi
	Padjajaran	Indonesia	Sains		
Doktor	-	-	-	-	-

5. PengalamanPenelitian

No	JudulPenelitian	Sponsor	Tahun
1.	Pengaruh Economic Value Added dan	PNBP Fakultas Ekonomi	2013
	Laporan Arus Kas Operasional	UNG	
	Perusahaan Terhadap Return Saham Pada		
	Perusahaan Perbankan Yang Listing di		
	Bursa Efek Indonesia		

6. Publikasi

No	JudulArtikel	NamaJurnal	Volume danNomor	Status Akreditasi
1				

Gorontalo, November 2014

Rio Monoarfa, SE.Ak., M.Si

NIP. 19741008 200212 1001



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor: 874/UN47.B8/DT/2014

Tentang

PENETAPAN DOSEN PELAKSANA PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2014

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NĘGERI GORONTALO

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maka Dosen perlu melaksanakan Penelitian:
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penelitian, Dosen memperoleh dana dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2013/2014;
- c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Dosen;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 110/M/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2010-2014;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
 - Nomor: 10 tahun 2005 tentang OTK Universitas Negeri Gorontalo;
 - Nomor: 18 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 282/H47.A2/OT/2009, tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Negeri Gorontalo:
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/ H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 tentang pemberian kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo :1603/H47.A2/KP/2010, tanggal 3 November 2010 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

- Memperhatikan : Surat Pengantar dari Ketua Jurusan Manajemen Nomor: 343/UN47.B8/JM/2014 tanggal 19 September 2014
 - Surat Pengantar dari Ketua Jurusan Pendidikan Nomor: 397/UN47.B8/JPE/2014 tanggal 19 September 2014
 - Surat Pengantar dari Ketua Jurusan Akuntansi Nomor: 693/UN47.B8/JA/2014 tanggal 19 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Menetapkan Dosen yang nama-nama serta judul kegiatan Penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana Penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo;

Kedua

: Bahwa nama-nama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ini bertugas melaksanakan kegiatan Penelitian sesuai dengan pedoman yang berlaku dan memasukkan laporan pelaksanaan tepat pada waktunya kepada Dekan melalui Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi

Ketiga

: Biaya pelaksanaan kegaiatan ini dibebankan pada Mata Anggaran yang berkenaan dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan kegiatan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Gorontalo

Pada tanggal

: 22 September 2014

DEKAN

Imran R. Hambali, S.Pd, SE, M.SA

NP. 19700823 199903 1 005 FAKULTAS EKONOMI DAN E

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo (sebagai laporan)

2. Pembantu Rektor I Universitas Negeri Gorontalo

3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalö

4. Pembantu Dekan II FEB Universitas Negeri Gorontalo

5. Ketua Jurusan di lingkungan FEB Universitas Negeri Gorontalo

6. Arsip.

Lampiran

Nomor Tanggal Perihal

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
874/UN47.B8/DT/2014
22 September 2014
Dosen Pelaksana Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014

NO	IVAINA	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN	VE
1.	Dra. Irina Popoi, S.Pd, M.Pd Roy Hasiru, S.Pd, M.Pd	Sarjana Pendidikan Ekonomi	Pengaruh Faktor Finansial dan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Sekretariat Dewan di Kabupaten Bone Bolango	
2.	Frahmawati Bumulo, SE, M.Si Radia Hafid, S.Pd, M.Si Meyko Panigoro, S.Pd, M.Pd	Sarjana Pendidikan Ekonomi	Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango	Ketua
3.	Hj. Irawati Abdul, SE, M.Si Melizubaida Mahmud, S.Pd, M.Si Hj. Fitri Hadi Yulia Akib, SE, ME	Sarjana Pendidikan Ekonomi	Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo	Ketua
4.	Rustam Tohopi, S.Pd, M.Si Erman Rahim, S.Pd, MH Ivan R. Santoso, SEI, M.Si	Sarjana Pendidikan Ekonomi	Analisis Kualitas Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo	Ketua
 5. 6. 	Idham M.Ishak, SE, M.Si	Sarjana Manajemen	Survey tentang Identifikasi Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Perbankan di Provinsi Gorontalo	Ketua
	Supardi Nani, SE, M.Si	Sarjana Manajemen	Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Sinar Mas Cabang Gorontalo	Ketua
7.	Raflin Hinelo, S.Pd, M.Si	Sarjana Manajemen	Analisis Hubungan Pemberian Insentif dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan	Ketua
8.	Robiyati Podungge	Sarjana Manajemen	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif terhadap Pengambilan Keputusan di Desa Langalo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango	Ketua
9.	Dr. H. Walidun Husain, M.Si	Diploma Tiga Adm. Perkantoran	Kompotensi, Kornpensasi dan Kinerja Kepala Desa di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	Ketua
	Drs. Maha Atma Kadji, M.Si Ronald S. Badu, SE, M.Si	Diploma Tiga Adm. Perkantoran	Analisis Faktor Determinan Kualitas Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP-PM)	Ketua
	Imran R. Hambali, S.Pd, St. WSA	Sarjana Akuntansi	Studi Etnosains Dilema Transpararisi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Surnbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)	Ketua
	Amir Lukum, S.Pd, MSA Rio Monoarfa, SE, Ak. MSi	: Sarjana : Akuntansi	Peran Good Corporate Governance dalam Corporate Sosial Responsibility Diisclosure pada BUMN yang Listing di Bursa Efek Indonesia	Ketua
J. 4	Zulkifli Bokiu, SE, Ak, M.Si	Sarjana Akuntansi	Dongoruh Falt. F. I.	Ketua

NO	NAMA /	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN	KET.
14.	Sahmin Naholo, SE, MM Siti Pratiwi Husain, SE, MISI	Sarjana Akuntansi	Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang terdaftar	Ketua
15	Mahdalena, SE, M.Si Nilawaty Yusuf, SE, AK, M.Si	Sarjana Akuntansi	di Bursa Efek Indonesia Kinerja Auditor sebagai Pengawas dan Konsultan dalam Perspektif Karyawan bagian Keuangan di PDAM Kota Gorontalo	Ketua
16 17	Hj. Valentina Monoarfa, SE, MM Hartati Tuli, SE, AK, M, Si Usman, S.Pd, SE, M.Si	Sarjana Akuntansi	Pengaruh Independensi terhadap Opini Auditor (Studi Kasus BPK Gorontalo)	Ketua
	Lukman Pakaya, S.Pd, MSA	Diploma Tiga Akuntansi	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	Ketua

Hambali, S.Pd, SE, M.SA

PANULIS EN PA 19 700823 199903 1 005